

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk memperoleh gambaran dalam menyusun kerangka berpikir penelitian. Selain itu, penelitian terdahulu ini digunakan untuk mengetahui persamaan serta perbedaan dari penelitian yang ada serta kajian yang dapat mengembangkan penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian terdahulu yang pertama yaitu Nanang Shonhadji (2017) dengan judul penerapan penyusunan laporan keuangan pada usaha kecil menengah berdasarkan SAK-EMKM yang dilakukan di kota Surabaya dengan obyek penelitian pada UMKM laundry, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAK-EMKM pada usaha laundry di kota Surabaya belum berjalan atau belum diterapkan, UMKM tersebut masih menggunakan cara manual untuk mencatat semuanya. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada judul dan objek penelitian, jika penelitian milik Nanang Sonhaji lebih fokus kepada program pengabdian masyarakat. Sedangkan milik peneliti lebih berfokus kepada fenomena yang terjadi atau kenyataan yang ada.

Peneliti terdahulu yang kedua yaitu Yayuk Susilowati (2017) dengan judul pencatatan pelaporan keuangan UMKM (study kasus di Kota Malang) terdapat 75 populasi dan diambil 50 UMKM sebagai sampel untuk mewakili jumlah keseluruhan populasi. Hasil penelitian diketahui bahwa laporan keuangan pada UMKM masih sederhana dengan melakukan pencatatan transaksi yang sering terjadi dalam usahanya dan SAK-EMKM ternyata masih belum dipahami para pelaku UMKM. Terdapat perbedaan dalam mengambil populasi dan sampel, milik peneliti hanya mengambil satu sampel saja namun sampel tersebut memenuhi kriteria sebagai objek penelitian bahwa sampel yang diambil merupakan UMKM yang paling terbesar di Kota Magetan.

Penelitian terdahulu yang ketiga adalah Beni Atsqia (2017) dengan judul penyusunan laporan keuangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pd Marga Jaya berdasarkan penerapan SAK-EMKM. Hasil penelitian yang dilakukan

menyimpulkan bahwa laporan keuangan UMKM Pd Marga Jaya belum menerapkan SAK-EMKM. Hal ini disebabkan karena UMKM hanya menyusun laba-rugi sederhana dalam laporan keuangannya. Perbedaan dengan peneliti terdapat pada objek penelitian dan hasil penelitian.

Penelitian terdahulu yang keempat yaitu Doddy Primayudia (2017) dengan judul penyusunan laporan keuangan usaha budidaya ikan nila di kermaba sejahtera berbasis SAK-EMKM. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aset biologis hewan ternak berupa ikan nila diakui sebagai persediaan dengan akun ikan nila dan diukur berdasarkan harga pasarnya serta disajikan pada laporan neraca. Hasil penyusunan laporan keuangan yang dilakukan anatra laba-rugi dan perubahan modal, laporan posisi keuangan atau neraca, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Semua laporan keuangan yang disusun sudah berdasarkan SAK-EMKM dan sesuai dengan siklus akuntansi. Perbedaan penelitian terdapat pada objek dan cara memilih sampel.

Penelitian terdahulu yang kelima yaitu Rezata Alfira Firmandhani (2017) dengan judul penerapan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK-EMKM pada UKM studi kasus pada konveksi *Goods Project* di Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UKM konveksi *Goods Project* masih belum menerapkan SAK-EMKM di konveksi goods project hanya mencatat jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas saja.

Dapat disimpulkan dari beberapa peneletian terdahulu bahwa lebih banyak para pemilik atau pelaku UMKM tidak memahami, tidak menegerti, tidak mengenal dan tidak membuat laporan keuangan yang sesuai dengan SAK-EMKM yang telah dikeluarkan oleh IAI dengan tujuan membantu para entitas kecil dalam menyusun laporan keuangan yang sederhana, tetapi terdapat kemungkinan kecil bahwa UMKM yang telah membuat laporan keuangan yang sesuai SAK-EMKM.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektor ekonomi (Tambunan, 2012:2). Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMi), Usaha Kecil (UK), Usaha

Menengah (UM) dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai asset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata pertahun atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan ketiga alat ukur ini berbeda disetiap Negara.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah selalu menarik untuk dikaji, bukan hanya dari aspek ketahanan, aspek pembiayaan, perolehan pinjaman atau dari aspek manajerial usaha. Pada era globalisasi khususnya dengan adanya integrasi ekonomi di Asia Tenggara, yaitu penyatuan ekonomi (*Economic Union*) yang menjadikan Asia Tenggara menjadi suatu komunitas perekonomian dengan basis produksi tunggal membuat UMKM harus mampu mempertahankan eksistensinya ditengah gempuran ekonomi global.

Dalam hal ini, UMKM dituntut untuk mampu bersaing dan menciptakan produk yang dapat diterima tidak hanya oleh konsumen dalam negeri (Indonesia) tetapi juga konsumen di Asia Tenggara. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) selalu hadir karena memang diperlukan. UMKM ini selalu pula dapat membuktikan ketahanannya, terutama ketika bangsa kita dilanda badai krisis ekonomi sejak Juli 1997. Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan upaya yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Besarnya kredit yang dapat diterima oleh usaha adalah Rp. 50.000.000. Usaha mikro adalah usaha produktif secara individu atau tergabung dalam koperasi dengan hasil penjualan Rp.100.000.000.

Di indonesia peran UMKM diatur dalam UUD No.20 thn 2008 tentang usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Menurut UU No.20 thn 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 sampai dengan

paling banyak Rp.2.500.000.000,00. Adapun faktor – faktor yang mendukung pelaku UMKM bisa dilihat dari segi sebagai berikut:

I. Ukuran perusahaan

Skala usaha berhubungan positif terhadap tingkat penyediaan informasi akuntansi, tingkat informasi akuntansi yang disediakan tergantung pada skala usaha yang diukur dengan perputaran dan jumlah karyawan. Hasil penelitian mereka menyatakan bahwa apabila skala usaha meningkat, maka proporsi perusahaan dalam penyediaan informasi akuntansi statutori, anggaran, informasi tambahan juga meningkat (Holmes and Nicholls, 1989) dalam (Kaukab; Susanti & Hartiyah, 2016).

Ukuran usaha dapat mempengaruhi pemikiran pengusaha terkait dengan kompleksitas dan semakin tingginya tingkat transaksi perusahaan sehingga diharapkan dengan makin besarnya ukuran usaha maka dapat mendorong seseorang untuk berpikir dan belajar terkait solusi untuk menghadapinya. Semakin besar usaha maka pemiliknya mulai memikirkan pentingnya suatu pembukuan dan pelaporan keuangan untuk membantu dalam pengelolaan aset dan penilaian kinerja keuangannya (Pratiwi & Hanafi, 2016:83).

II. Sosialisasi

Pemberian sosialisasi dan pelatihan, jenjang pendidikan, latar belakang pendidikan dan masa tugas berpengaruh positif terhadap tingkat pemahaman atas penerapan SAK EMKM. Semakin seringnya pemberian sosialisasi dan pelatihan maka tingkat pemahaman atas penerapan SAK EMKM semakin tinggi (Amalia, 2017)

III. Tingkat pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan bangsa (UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Pendidikan adalah proses pengalaman pribadi, baik lahiriah maupun batiniah. Keberhasilan seorang manajer tergantung pada pendidikan dan

kemampuan belajar dalam lingkungannya. Seorang manajer dituntut untuk menguasai aneka ketrampilan teknis dan kemampuan yang tinggi untuk belajar dan beradaptasi dengan lingkungannya (Soemanto, 1992:21) dalam (Meidiyustiani, 2016)

Pada dasarnya manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya, baik pendidikan formal, informal maupun pendidikan non-formal, karena dengan pendidikan potensi dirinya dapat berkembang melalui proses pembelajaran atau cara lain yang dikenal dan dilakukan oleh masyarakat. Pengaruh pendidikan kewirausahaan selama ini sebagai salah satu faktor penting untuk menumbuhkan dan mengembangkan hasrat, jiwa, dan perilaku berwirausaha di kalangan generasi muda. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh, baik pendidikan formal maupun non formal sesuai bidang pekerjaan maka semakin tinggi pula pengalaman intelektual yang dimiliki. Pengalaman intelektual ini akan dapat mempermudah pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan sehingga apabila dikaitkan dengan peran pemilik pemilik usaha dalam penggunaan informasi akuntansi di dalam usahanya, maka pemilik usaha yang memiliki pendidikan formal yang memadai akan menciptakan kemampuan dan keahlian yang lebih baik dalam menggunakan informasi akuntansi dibandingkan dengan pemilik usaha yang memiliki latar belakang pendidikan formal yang lebih rendah (Sitorus, 2017)

Pendidikan pemilik memiliki pengaruh terhadap penerapan SAK EMKM. Semakin tinggi tingkat pendidikan pemilik UMKM maka semakin tinggi juga pengetahuan akan akuntansinya tentang penerapan SAK EMKM. Lebih lanjut penelitian dari (Dewi, Yuniarta & Wahyuni, 2017) dijelaskan bahwa variabel Tingkat Pendidikan Pemilik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penggunaan SAK EMKM pada UKM di Kecamatan Buleleng (Pratiwi & Hanafi, 2016).

Tingkat pendidikan pemilik berpengaruh positif terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pendidikan pemilik UMKM maka semakin tinggi implementasi SAK EMKM pada UMKM. Amalia (2017) dalam penelitiannya menunjukkan jenjang pendidikan, latar belakang pendidikan berpengaruh positif terhadap tingkat pemahaman atas penerapan SAK EMKM. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh dan

latar belakang akuntansi akan mempermudah dalam penerapan SAK EMKM (Mulyaga, 2016).

IV. Umur Usaha

Umur perusahaan sebagai berikut: Umur perusahaan merupakan awal perusahaan melakukan aktivitas operasional hingga dapat mempertahankan *going concern* perusahaan tersebut atau mempertahankan eksistensi dalam dunia bisnis (Nugroho, 2012).

SAK EMKM ini merupakan salah satu dorongan kepada pengusaha-pengusaha di Indonesia agar dapat berkontribusi secara signifikan dalam pengembangan UMKM yang lebih maju. Mengapa hal ini sangat dibutuhkan untuk usaha terutama UMKM? Karena laporan keuangan merupakan hal yang penting dalam sebuah usaha. Pastinya setiap pengeluaran dan pemasukkan harus jelas dan harus seimbang agar usaha bisa lebih maju lagi.

Standar Akuntansi keuangan atau SAK adalah pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya dilansir dari iaiglobal.or.id. Menurut jurnal.id, Indonesia memiliki 4 (empat) tipe SAK yang berlaku di Indonesia, yaitu:

- SAK (Standar Akuntansi Keuangan),
- SAK-ETAP (Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntansi Publik),
- PSAK-Syariah (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah),
- SAP (Standar Akuntansi Pemerintah).

IAI selanjutnya menyusun SAK yang lebih sederhana dari SAK-ETAP yaitu SAK EMTM pada pertengahan 2015 menurut welojoe.id. Hal ini dikarenakan masih

banyaknya UMKM di Indonesia yang belum mampu untuk membuat serta menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAK yang berlaku.

2.2.2 Usaha Kecil

Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, dan memenuhi kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang (Tohar, 2001:1).

2.2.3 Usaha Menengah

Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih Rp.500.000.000,00 sampai Rp.10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,000.

Tabel 2.1 Klarifikasi UMKM berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008

Ukuran usaha	Aset	Omset
Usaha mikro	Minimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha kecil	>50 juta – 500 juta	Maksimal 3 miliar
Usaha menengah	>500 juta – 10 miliar	>2,5 miliar – 50 miliar

Sumber : UU No.20 Tahun 2008

2.2.4 Karakteristik UMKM di Indonesia

Sulistiyastuti (2004) menyebutkan ada empat alasan yang menjelaskan posisi strategis UMKM di Indonesia. Pertama, UMKM tidak memerlukan modal yang besar sebagaimana perusahaan besar sehingga pembentukan usaha ini tidak sesulit usaha besar. Kedua, tenaga kerja yang diperlukan tidak menuntut pendidikan formal tertentu. Ketiga, sebagian besar berlokasi di pedesaan dan tidak memerlukan infrastruktur sebagaimana perusahaan besar. Keempat, UMKM terbukti memiliki ketahanan yang kuat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi.

UMKM memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan jenis usaha besar, termasuk karakteristik yang membedakan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sendiri. Berdasarkan data BPS (2006) yang dikutip oleh Tambunan (2009) dalam buku *UMKM di Indonesia*, diketahui bahwa dari segi tenaga kerja, lebih dari sepertiga (sekitar 34,5%) UMKM dikelola oleh tenaga kerja berusia di atas 45 tahun, dan hanya sekitar 5,2% pengusaha UMKM yang berumur di bawah 25 tahun.

Tambunan (2000) seperti dikutip oleh Sulistyastuti (2004) mengungkapkan bahwa tenaga kerja yang diperlukan oleh industri kecil tidak menuntut pendidikan formal yang tinggi. Sebagian besar tenaga kerja yang diperlukan oleh industri ini didasarkan atas pengalaman (*learning by doing*) yang terkait dengan faktor historis (*path dependence*). Tulisan lanjutan Tambunan (2009) mengenai UMKM mengungkapkan bahwa struktur pengusaha menurut tingkat pendidikan formal memberi kesan adanya hubungan positif antara tingkat pendidikan rata-rata pengusaha dengan skala usaha. Artinya, semakin besar skala usaha, yang umumnya berasosiasi positif dengan tingkat kompleksitas usaha yang memerlukan

keterampilan tinggi dan wawasan bisnis yang lebih luas, semakin banyak pengusaha dengan pendidikan formal tersier.

Selanjutnya, Tambunan (2012:8) menjelaskan, Latar belakang pengusaha kecil lebih beragam dari pada pengusaha mikro, walaupun latar belakang ekonomi juga merupakan alasan utama, tetapi sebagian lain mempunyai latar belakang lebih realistis dengan melihat prospek usaha kedepan dengan kendala modal terbatas. Sebagian besar pengusaha kecil di Indonesia mempunyai alasan berusaha karena adanya peluang bisnis dan pangsa pasar yang aman dan besar. Ada juga sejumlah pengusaha kecil beralasan bahwa itu karena faktor keturunan/warisan, dibekali keahlian dan membuka lapangan kerja baru bagi warga setempat. Meski masih terdapat sejumlah pengusaha yang beralasan karena tidak ada kesempatan dibidang lain dengan berbagai macam alasan, misalnya pendidikan formal yang rendah, atau kondisi fisik yang tidak memungkinkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengusaha kecil mempunyai alasan yang lebih baik daripada UMi.

Mengacu pada data BPS (2006) yang dikutip Tambunan (2009) diketahui bahwa sebagian besar pengusaha UMKM mengungkapkan alasan kegiatan usaha yang mereka lakukan adalah latar belakang ekonomi. Artinya usaha ini dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh perbaikan penghasilan dan atau merupakan startegi untuk bertahan hidup. Hal ini didukung dengan kondisi tingkat pendidikan pengusaha yang mayoritas tergolong rendah. Usaha ini dilakukan dengan alasan tidak ada lagi jenis pekerjaan lain yang dapat dilakukan dengan tingkat pendidikan formal yang tergolong rendah. Beberapa pengusaha juga menjalankan usaha dengan mempertimbangkan prospek usaha ke depan, seperti adanya peluang dan pangsa pasar yang aman dan besar. Namun, sebagian lainnya mengungkapkan latar belakang keturunan, artinya meneruskan usaha warisan keluarga.

Data BPS (2006) yang dikutip oleh Tambunan (2009) juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki banyak UMKM, namun tidak seluruh UMKM ini berbadan hukum. Justru sebagian besar UMKM yang ada, yakni sekitar 95,1 persen dari jumlah unit usaha tidak berbadan hukum. Hal ini dapat diterima dengan alasan kebanyakan UMKM memiliki modal yang sangat minim dan terbentur berbagai birokrasi dan persyaratan yang rumit dan kompleks untuk mendapatkan pelayanan dalam pengembangan usahanya.

Menurut Sulistyastuti (2004), yang juga menjadi karakteristik UMKM adalah pemakaian bahan baku lokal. Keberadaan UMKM seringkali terkait dengan tingginya intensitas pemakaian bahan baku lokal, misalnya UMKM kerajinan *meubel* ukiran khas Jepara, batik asal Pekalongan dan berbagai komoditas lokal unggulan lain yang dijadikan bahan baku dalam usaha.

2.2.5 SAK EMKM

SAK EMKM ditujukan untuk digunakan oleh entitas yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi yang diatur dalam SAK ETAP. SAK EMKM tidak memberikan definisi dan kriteria kuantitatif entitas mikro, kecil, maupun menengah. Yang sesuai dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. SAK EMKM disusun berdasarkan topik dan dinyatakan dalam Bab 1 sampai dengan Bab 18. Berikut 18 Bab SAK-EMKM :

- Bab 1 Ruang Lingkup
- Bab 2 Konsep dan Prinsip Pervasif
- Bab 3 Penyajian Laporan Keuangan
- Bab 4 Laporan Posisi Keuangan
- Bab 5 Laporan Laba Rugi
- Bab 6 Catatan atas Laporan Keuangan
- Bab 7 Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan
- Bab 8 Aset dan Liabilitas Keuangan
- Bab 9 Persediaan
- Bab 10 Investasi pada Ventura Bersama
- Bab 11 Aset Tetap
- Bab 12 Aset Takberwujud
- Bab 13 Liabilitas dan Ekuitas
- Bab 14 Pendapatan dan Beban
- Bab 15 Pajak Penghasilan
- Bab 16 Transaksi dalam Mata Uang Asing
- Bab 17 Ketentuan Transisi
- Bab 18 Tanggal Efektif

Dalam SAK EMKM, laporan keuangan entitas disusun menggunakan asumsi dasar akrual dan kelangsungan usaha, sebagaimana yang digunakan oleh entitas selain entitas mikro, kecil, maupun menengah, serta menggunakan konsep entitas bisnis. Laporan keuangan entitas terdiri dari: (a) laporan posisi keuangan, (b) laporan laba rugi, dan (c) catatan atas laporan keuangan. SAK EMKM dilengkapi dengan Contoh Ilustratif Laporan Keuangan. Entitas dapat menggunakan Contoh Ilustratif Laporan Keuangan sebagai panduan untuk mempermudah dan mendapatkan pemahaman dalam penyusunan laporan keuangannya. SAK EMKM berlaku efektif tanggal 1 Januari 2018, namun penerapan ini dianjurkan.

Sebagai bagian organisasi IAI yang mempunyai otonomi untuk menyusun dan mengesahkan standar akuntansi keuangan, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI telah mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) menjadi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) dalam rapatnya tanggal 24 Oktober 2016. Hal ini menjadi bukti besarnya perhatian IAI untuk seluruh pelaku ekonomi, terutama EMKM. SAK EMKM ini sengaja dibuat sederhana agar menjadi Standar Akuntansi Keuangan yang mudah dipahami oleh sekitar 57,8 juta pelaku UMKM.

Kerangka pelaporan keuangan SAK EMKM ini diharapkan dapat membantu entitas dalam melakukan transisi dari pelaporan keuangan yang berdasar kas ke pelaporan keuangan dengan dasar akrual. Penerbitan SAK EMKM ini diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong literasi keuangan bagi UMKM di Indonesia sehingga memperoleh akses yang semakin luas untuk pembiayaan dari industri perbankan. Ke depannya, SAK EMKM ini juga diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan dan pengembangan pedoman atau panduan akuntansi bagi UMKM yang bergerak di berbagai bidang usaha.

2.2.6 Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

Laporan keuangan (*financial statement*) adalah hasil akhir dari suatu proses akuntansi, sebagai ikhtisar menyangkut transaksi-transaksi keuangan selama periode berjalan (Sirait, 2014:19).

Menurut Harrison *et al* (2012: 2) laporan keuangan adalah dokumen bisnis yang digunakan perusahaan dalam melaporkan hasil aktivitasnya kepada kelompok berkepentingan.

IAI dalam SAK EMKM (2016:8-9) Penyajian wajar dalam Laporan Keuangan sesuai persyaratan SAK EMKM dan pengertian laporan keuangan yang lengkap untuk entitas dimana Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan, dan beban. Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan pada akhir setiap periode pelaporan, termasuk informasi komparatifnya.

Entitas menyusun laporan keuangan dengan menggunakan dasar akrual. Dalam dasar akrual, akun-akun diakui sebagai aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk masing-masing akun-akun tersebut. Menurut IAI dalam SAK EMKM (2016:9) Laporan keuangan entitas meliputi:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
2. Laporan laba rugi selama periode;
3. Catatan atas laporan keuangan, yang berisi tambahan dan rincian akun-akun tertentu yang relevan.

Penjelasan mengenai laporan keuangan menurut SAK EMKM sebagai berikut :

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode

Laporan posisi keuangan (*statement of financial position*) lazimnya dikenal sebagai neraca (*balance sheet*). Menurut Kartikahadi *et al* (2012:119) Laporan posisi keuangan atau neraca adalah “suatu daftar yang menunjukkan posisi keuangan, yaitu komposisi dan jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas dari suatu entitas tertentu pada suatu tanggal tertentu”.

Menurut IAI dalam SAK EMKM (2016:11) Laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan.

Laporan posisi keuangan entitas menurut SAK EMKM dapat mencakup akun-akun berikut:

- a. kas dan setara kas;

- b. piutang;
- c. persediaan;
- d. aset tetap;
- e. utang usaha;
- f. utang bank;
- g. ekuitas

2. Laporan laba rugi selama periode

Laporan Laba Rugi (*Profit & loss statement/income statement*) merupakan laporan yang memberikan informasi kinerja terhadap perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya dalam jangka waktu tertentu (Sirait, 2014:19).

Menurut Hery (2012:111) Laporan Laba Rugi dapat disusun dalam dua bentuk pilihan yaitu sebagai berikut:

a. Bentuk langsung (*Single-step*)

Laporan laba rugi dengan bentuk langsung menekankan pada total pendapatan dan total beban sebagai faktor penentu laba/rugi bersih. Seluruh pendapatan maupun beban baik berasal dari kegiatan normal perusahaan maupun kegiatan diluar perusahaan atau pendapatan dan beban lain-lain digabungkan menjadi satu jumlah pendapatan dan beban.

b. Bentuk Bertahap (*multiple-step*)

Laporan laba rugi dalam bentuk bertahap menekankan tahapan-tahapan dalam menentukan laba bersih, dimana bagian operasi dipisahkan dan dibedakan dengan bagian non operasi.

Menurut IAI dalam SAK EMKM (2016:13) entitas dapat menyajikan laporan laba rugi yang merupakan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode .

Dalam laporan laba rugi entitas dapat mencakup akun-akun sebagai berikut:

- a. Pendapatan;
- b. beban keuangan;
- c. beban pajak.

3. Catatan atas laporan keuangan, yang berisi tambahan dan rincian akun-akun tertentu yang relevan.

Laporan keuangan tidak memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan pihak yang berkepentingan atau pemakai laporan tersebut, maka dari itu perlu adanya

catatan atas laporan keuangan untuk menambahkan informasi yang dibutuhkan dalam bentuk deskriptif dan dilaporkan dalam bentuk narasi, selain itu juga dapat menginterpretasikan angka – angka yang terkandung didalam laporan keuangan, maka dari itu pemakai juga perlu melihat catatan atas laporan keuangan agar dapat memahami asumsi-asumsi yang dipakai dalam keseluruhan laporan keuangan.

Menurut Kartikahadi *et al* (2012:134) catatan atas laporan keuangan seharusnya dapat memuat informasi sebagai berikut:

- a. Dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan.
- b. Informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan namun diisyaratkan oleh SAK.
- c. Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan namun relevan untuk memahami setiap pos-pos laporan keuangan.

Menurut IAI dalam SAK EMKM (2016:14) Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis dimana Setiap akun dalam laporan keuangan menunjukkan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan yang berisikan tambahan memuat:

- a. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM;
- b. ikhtisar kebijakan akuntansi;
- c. informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

Cara penyajian laporan keuangan EMKM telah disusun secara rinci pada ED SAK EMKM yang dimana penyajiannya harus konsisten, informasi keuangan yang komparatif, serta lengkap. Minimal laporan keuangan tersebut terdiri dari:

- Laporan posisi keuangan pada akhir periode,
- Laporan laba rugi selama periode,

- Catatan atas laporan keuangan, yang berisi tambahan dan rincian akun-akun tertentu yang relevan.

Informasi posisi keuangan yang ditujukan untuk laporan keuangan telah disusun dalam ED SAK EMKM. Informasi ini terdiri dari informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada tanggal tertentu yang disajikan dalam laporan ini. Berikut penjelasan unsur-unsur laporan posisi keuangan dalam ED SAK EMKM.

- **Aset** merupakan sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan yang dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh oleh entitas. Aset sendiri terbagi menjadi dua macam yaitu aset yang memiliki wujud dan aset tidak memiliki wujud (tak berwujud).
- **Liabilitas** merupakan kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Karakteristik esensial dari liabilitas adalah kewajiban yang dimiliki entitas saat ini untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu yang dapat berupa kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif. Kewajiban konstruktif yaitu kewajiban yang biasanya melibatkan pembayaran kas, penyerahan aset selain kas, pemberian jasa, dan/atau penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain.
- **Ekuitas** adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Klaim ekuitas adalah klaim atas hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Klaim ekuitas merupakan klaim terhadap entitas, yang tidak memenuhi definisi liabilitas.

Laporan laba rugi sebuah EMKM mencakup informasi tentang pendapatan, beban keuangan serta beban pajak pada suatu entitas. Sesuai dengan ED SAK EMKM, laporan laba rugi memasukkan semua penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode, kecuali ED SAK EMKM mensyaratkan lain.

Catatan atas laporan keuangan yang disusun dalam ED SAK EMKM harus memuat tentang:

- Sebuah pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan ED SAK EMKM,
- Ikhtisar kebijakan akuntansi,
- Dan, informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

Setiap catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis selama hal tersebut terbilang praktis. Setiap akun dalam laporan keuangan merujuk-silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan agar mendapatkan informasi yang tepat, akurat, serta relevan.

Dalam ED SAK EMKM, diharapkan entitas telah menerapkan SAK EMKM ini pada periode tahun buku setelah 1 Januari 2018. Anda ingin menerapkan SAK EMKM tetapi belum tahu cara memulainya? Bagi Anda yang ingin menerapkan ED SAK EMKM tetapi belum atau tidak menyusun laporan keuangan sebelumnya atau menggunakan SAK lain, Anda bisa menyusun laporan keuangan pertama yang sesuai dengan ED SAK EMKM.

Laporan pertama sesuai dengan ED SAK EMKM adalah laporan keuangan pertama dimana entitas membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa terkecuali tentang kepatuhan terhadap ED SAK EMKM dalam catatan atas laporan keuangannya. SAK EMKM memang ditujukan sebagai laporan keuangan UMKM agar semakin mudah dalam menyusun serta membuatnya.

2.2.7 Tujuan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

Laporan keuangan merupakan proses akuntansi yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan data atau angka keuangan serta aktivitas perusahaan kepada pihak yang berkepentingan. Maka dari itu laporan keuangan mempunyai tujuan

menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengenai posisi keuangan dan hasil usaha (Hery, 2012:2).

Tujuan laporan keuangan menurut *Accounting Principle Board Statement no.4* mengklasifikasikan tujuan menjadi tujuan khusus, tujuan umum dan tujuan kualitatif, tujuan tersebut dapat diringkas sebagai berikut.

1. Tujuan *Khusus* dari laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi berlaku umum, posisi keuangan, hasil operasi, dan perubahan –perubahan lainnya di dalam laporan keuangan.
2. Tujuan *Umum* dari laporan keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai sumber daya ekonomi dan kewajiban dari perusahaan bisnis agar dapat:
 - 1) Mengevaluasi kelebihan dan kekurangannya;
 - 2) Mengajukan pendanaan dan investasinya;
 - 3) Mengevaluasi kemampuan dalam memenuhi komitmen;
 - 4) Menunjukkan berbagai dasar sumber daya bagi pertumbuhannya.
 - b. Untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan tentang perubahan dalam sumber daya bersih dari aktivitas perusahaan bisnis yang diarahkan untuk memperoleh laba agar dapat:
 - 1) Menyajikan ekspektasi pengembalian dividen kepada para investor;
 - 2) Menunjukkan kemampuan operasi perusahaan dalam membayar kreditor dan pemasok, memberikan pekerjaan bagi karyawannya, membayar pajak, dan menghasilkan dana untuk perluasan usaha;
 - 3) Memberikan informasi untuk perencanaan dan pengendalian kepada manajemen;
 - 4) Menyajikan profitabilitas jangka panjang.
 - c. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk mengestimasi potensi penghasilan bagi perusahaan.
 - d. Untuk memberikan informasi lain yang dibutuhkan mengenai perubahan dalam sumber daya ekonomi dan kewajiban.
 - e. Untuk mengungkapkan informasi lain yang relevan terhadap kebutuhan pengguna laporan.
3. Tujuan *Kualitatif* dari akuntansi keuangan adalah sebagai berikut:

- a. *Relevansi*, yang artinya pemilihan informasi yang memiliki kemungkinan paling besar untuk memberikan bantuan kepada para pengguna dalam keputusan ekonomi mereka
- b. *Dapat dimengerti*, yang artinya tidak hanya informasi tersebut harus jelas, tetapi para pengguna juga harus memahaminya.
- c. *Dapat diverifikasi*, yang artinya hasil akuntansi dapat didukung oleh pengukuran – pengukuran yang independen, dengan menggunakan metode – metode pengukuran yang sama.
- d. *Netralitas*, yang artinya informasi akuntansi ditujukan kepada kebutuhan umum dari pengguna, bukannya kebutuhan – kebutuhan tertentu dari pengguna – pengguna yang spesifik.
- e. *Ketepatan waktu*, yang artinya komunikasi informasi secara lebih awal, untuk menghindari adanya kelambatan atau penundaan dalam pengambilan keputusan ekonomi.
- f. *Komparabilitas (daya banding)*, yang secara tidak langsung berarti perbedaan – perbedaan yang terjadi seharusnya bukan diakibatkan oleh perbedaan perlakuan akuntansi keuangan yang diterapkan.
- g. *Kelengkapan*, yang artinya adalah telah dilaporkannya seluruh informasi yang “secara wajar” memenuhi persyaratan dari tujuan kualitatif yang lain.

Menurut Sirait (2014:20) Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan kepada para pemakai informasi yang dapat digunakan sebagai referensi dalam proses pengambilan keputusan.

Sedangkan IAI dalam SAK EMKM (2016:2) mengemukakan Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang dapat bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus dalam memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Pengguna tersebut dapat meliputi penyedia sumber daya bagi entitas seperti kreditor maupun investor. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas dasar sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

2.2.8 Perbedaan SAK ETAP dan SAK EMKM

Tabel 2.2 perbedaan antara SAK ETAP dan SAK EMKM

	SAK ETAP	SAK EMKM
Definisi	Standar akuntansi keuangan yang dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntan bilitas yang signifikan namun menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi penggunaanya.	Ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah
Laporan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Nama laporan keuangan Neraca dan Laporan Laba Rugi. • Laporan perubahan ekuitas tidak perlu disajikan terpisah jika perubahan ekuitas hanya dari laba dan deviden 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan posisi keuangan. • Laporan laba rugi. • Catatan tas laporan keuangan
Kebijakan akuntansi	Kombinasi bisnis Laporan keuangan konsolidasi tidak boleh, namun menggunakan metode ekuitas Pajak tangguhan	Jika diatur dalam SAK EMKM mengikuti SAK EMKM
Konsep dan prinsip pervasif	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep dan prinsip pervasif merupakan KDPPLK (kerangka 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam konsep pervasive tidak dikenakan

	SAK ETAP	SAK EMKM
	<p>dasar penyajian dan pengukuran LK) untuk ETAP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tujuan laporan keuangan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna untuk pengambilan keputusan ekonomi 	<p>menggunakan standar lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tujuan pelaporan keuangan menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan bagi sejumlah besar pengguna (mis kreditor dan investor) dalam pengambilan keputusan ekonomi <i>general purpose</i>.

(Sumber: <https://www.scribd.com/document/340903340/Sak-Etap-Dan-Emkm>)

2.3 Kerangka Pikir Penelitian

